

The Republic of Indonesia's Free and Active Political Policy in International Relations Between Nations

Kebijakan Politik Bebas Aktif Negara Republik Indonesia di dalam Hubungan Internasional Antar Bangsa

Haryanto Haryanto ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: Haryanto.phl@gmail.com

Abstract

A country's foreign policy is a means to achieve the desired goals for the national interests of the country. Likewise with Indonesia, establishing cooperation in the international world and between countries is not a taboo. With the principle of free and active politics as a guideline for Indonesia in exploring the wilderness of the international world which is full of various interests and conflicts, Indonesia must be able to formulate its foreign policy policies well, not only limited to national interests but must be able to show contributions to the international world so that Indonesia's name can be taken into account in its goal of becoming a Middle Power country. Indonesia's foreign policy line cannot be separated from the views and ideology of the ruling regime, whether using persuasive or confrontational diplomacy. Even the principle of free and active which is currently held has an ambiguous interpretation or meaning, whether the



Copyrights © Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

free and active in question is free in the sense of being neutral in international conflicts between nations, but still actively providing solutions and contributions in resolving conflicts, or free and active in the context of being free to have one's own views and stances to support or not support an entity or country in an international conflict based on the foundation and limitations of the country's constitution. Interestingly, both of these meanings of active freedom have been applied in Indonesia's foreign policy.

KEYWORDS *Political Policy, Conflict, Diplomacy*

Kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan sarana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan demi kepentingan nasional negara tersebut. Begitu pun dengan Indonesia, menjalin kerjasama dalam dunia internasional dan antar negara bukanlah suatu hal yang tabu. Dengan prinsip politik bebas aktif yang menjadi pedoman Indonesia didalam menjelajah belantara dunia internasional yang sarat dengan berbagai kepentingan dan konflik menjadikan Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya dengan baik tidak hanya terbatas pada kepentingan nasional saja melainkan harus bisa menunjukkan kontribusi kepada dunia internasional sehingga nama Indonesia dapat diperhitungkan dalam citanya menjadi negara *Middle Power*. Garis kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan dan ideologi rezim yang berkuasa apakah menggunakan cara diplomasi yang persuasif ataukah yang konfrontatif. Bahkan terhadap prinsip bebas aktif yang sampai saat ini dipegang memiliki interpretasi atau pemaknaan yang ambigu apakah bebas aktif yang dimaksud adalah bebas dalam artian bersikap netral dalam konflik internasional antar bangsa, namun tetap aktif memberikan solusi dan sumbangsih dalam meyelesaikan konflik, ataukah bebas aktif dalam konteks bebas untuk memiliki pandangan dan pendirian tersendiri untuk mendukung ataupun tidak mendukung suatu entitas atau negara didalam konflik internasional yang didasarkan landasan dan Batasan konstitusi negara. Menarik nya kedua pemaknaan bebas aktif tersebut pernah diaplikasikan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.

KATA KUNCI *Kebijakan Politik, Konflik, Diplomasi*

Pendahuluan

Dinamika kehidupan bermasyarakat didalam satu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain. Konsepsi hubungan antar negara merupakan suatu keniscayaan, karena tidak ada di dunia ini ada negara yang bisa hidup dan berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya tanpa bantuan dan hubungan dengan negara lain. Bahkan negara seperti Korea Utara yang bisa dikatakan hampir terisolasi masih bergantung dan membina hubungan baik dengan Tiongkok sebagai sekutunya. Pada akhirnya relasi antar negara pastinya memiliki kepentingan dan tujuan yang bermuara pada pertahanan keamanan dan kesejahteraan ekonomi negara masing-masing.

Hubungan antar negara-negara didunia ini tidak selamanya terjalin dalam kedamaian, karena sejarah telah mencatat konflik dan perselisihan antar negara baik konfrontasi tidak langsung ataupun konfrontasi langsung dengan penggerahan senjata. Perang-perang antar negara khususnya perang dunia I dan perang dunia II telah membawa negara-negara kepada suatu pemikiran bahwa perlunya suatu batasan-batasan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan prinsip saling menguntungkan, dan menghargai kedaulatan negara masing-masing untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Pembentukan Perserikatan Bangsa –Bangsa (PBB) merupakan organisasi terbesar yang menghimpun hampir seluruh negara didunia dengan tujuan utama menjadi wadah perdamaian antar bangsa¹. Selain PBB ada juga Organisasi Kerjasama Islam, dan beberapa organisasi lain yang melibatkan negara sebagai entitas keanggotaannya baik kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan termasuk kerjasama pertahanan keamanan. Terciptanya wadah organisasi yang mengatur hubungan antar negara dari berbagai aspek kehidupan, mengharuskan setiap negara memiliki strategi komunikasi dan kebijakan yang baik dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, dan

¹ Jumlah anggota PBB saat ini sebanyak 193 negara, dan sebagian negara yang belum diakui kedaulatan secara internasional/ negara non anggota ditetapkan sebagai pengamat seperti Tahta Suci Vatikan dan Palestina.

dipihak lain memastikan adanya penghargaan antar negara terhadap kedaulatan masing-masing. Konsep ini yang kemudian melahirkan dengan apa yang kita sebut dengan politik luar negeri.

Berangkat dari pemahaman yang telah diuraikan diatas, penting untuk kita melihat penjabaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan politik luar negeri menurut para pakar. Profesor Miriam Budiharjo memberikan definisi politik luar negeri sebagai seperangkat kebijakan dari pemerintah dalam membina hubungan relasi kerjasama dengan negara/pemerintah lain dalam beraneka aspek dan bidang untuk kepentingan bersama.² Sementara interpretasi dalam dimensi yang lebih praktis disampaikan oleh Riza Sihbudi bahwa politik hubungan luar negeri adalah suatu kebijakan politik nasional (*National Policy*) dari suatu negara yang menjadi gambaran nyata tentang model kebijakan politik luar negeri (*Foreign Policy*).³

Berbeda pula pemikiran dari Ari Margono yang menempatkan politik luar negeri dengan kebijakan luar negeri dalam perspektif yang berbeda. Menurut nya politik luar negeri adalah tentang bagaimana suatu negara memandang dunia internasional dalam bingkai kepentingan nasional, sementara kebijakan luar negeri adalah instrumen suatu negara dalam menjalankan strategi politik luar negeri. Pemahaman ini menjelaskan bahwa tendensi dari politik luar negeri suatu negara yang tidak mudah berubah-ubah, namun terhadap kebijakan luar negeri dapat berubah sejalan dengan kepentingan nasional dan perkembangan dunia internasional⁴.

Sementara definisi politik luar negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri di jelaskan bahwa “*Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional*”.

² Rofii Adji Sayekti, Moh, (2018). Peranan Politik Luar negeri Bebas Aktif dalam Percaturan Global. Yogyakarta: Cempaka Putih. Hal 4.

³ ibid

⁴ ibid

Berangkat dari definisi politik luar negeri, tentu kemudian timbul pertanyaan bagaimana politik luar negeri dikonstruksikan dalam rumusan kebijakan-kebijakan, apa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan pandangan dan kebijakan politik luar negerinya. Adapun dalam berbagai literatur dapat dirangkum beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, diantaranya:

1. Tujuan dan Kepentingan Nasional

Setiap negara dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara ataupun berinteraksi dengan dunia internasional pasti memiliki tujuan dan kepentingan yang berakar dari kebijakan-kebijakan nasional termasuk didalamnya kondisi dan situasi politik dinegara tersebut. Sebagai contoh negara maju memiliki orientasi tujuan yang berbeda dengan negara berkembang. Negara seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis misalnya memiliki tujuan menjadi negara-negara yang superior dan berpengaruh dalam panggung internasional dari sisi politik terhadap negara-negara berkembang. Kecenderungan negara maju membangun hegemoni politik dalam kerjasama internasional antar negara merupakan strategi dalam mencapai kepentingan-kepentingan nasional dalam negeri. Negara maju terkadang berdiri dalam eksistensi nya sebagai negara penolong bagi negara berkembang, padahal dibalik itu semua ada potensi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional negara maju tersebut. Contohnya Seperti Negara Srilanka yang mendapatkan bantuan hutang dalam pembangunan pelabuhan Hambantota sebesar US\$ 1.5 Milyar pada tahun 2010 dari Tiongkok, namun akibat gagal bayar hutang tersebut pada tahun 2017 Srilanka harus melepas penguasaan pelabuhan tersebut kepada tiongkok untuk jangka waktu 99 tahun.⁵ Berbeda dengan negara berkembang yang tujuan dan kepentingan politik luar negeri lebih menekan pada aspek yang lebih bersifat konsumtif dalam kerjasama internasional.

⁵ www.detik.com. Cerita Srilanka Jual Pelabuhan Akibat Gagal Bayar Hutang Ke China. <http://dtk.id/NX57WX>

2. Ideologi Politik Nasional

Pandangan dan Kebijakan Politik Luar Negeri suatu negara tentu tidak akan bisa lepas dari ideologi yang dianut pemimpin/penguasa negara tersebut. lazimnya suatu negara akan lebih memposisikan kerjasama dan hubungan yang baik dengan negara yang memiliki ideologi yang sama atau pun yang tidak saling berbenturan. Sebagai contoh Negara seperti Rusia dengan komunismenya lebih nyaman membina hubungan yang intensif dengan Tiongkok maupun negara amerika latin yang berideologi komunisme ataupun sosialis, dibanding dengan negara-negara yang berfaham demokrasi kapitalis dan atau liberal. Negara Indonesia sendiri menjadi contohnya didalam rezim yang berbeda, rumusan kebijakan politik luar negeri juga bisa bergeser jauh. Pada masa Orde Lama Presiden Soekarno lebih membina hubungan erat dengan negara berideologi kiri dengan komunisme dan sosialismenya, dan menjauhi negara barat yang dianggap negara penjajah imperialis. Sementara ketika rezim berganti di era Orde Baru, Presiden Soeharto lebih mendekatkan diri dengan negara barat yang dianggap lebih bisa memberikan bantuan untuk pembangunan nasional.

3. Pertahanan dan Keamanan Negara

Arah kebijakan politik luar negeri suatu negara juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional dibidang pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan keamanan merupakan isu yang sangat sensitif dan krusial bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang yang masih bergantung dengan negara maju dalam pasokan senjata dan kebutuhan militer. Jual beli senjata dan kebutuhan militer pertahanan keamanan antar negara berada dalam proses dan prosedur yang rumit jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan negara produsen. Negara maju yang berteknologi tinggi sangat selektif menjual persenjataan ataupun teknologi militernya kepada negara lain. Hal ini sangat terkait erat dengan kepentingan nasional negara maju tersebut, jangan sampai persenjataan yang dijual malah dipergunakan untuk menyerang negara ataupun sekutu dari negara produsen senjata tersebut. Relasi hubungan yang baik

antar negara dapat disimpulkan dari hubungan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.

4. Perekonomian

Masalah perekonomian adalah salah satu kebutuhan yang memaksa terjalinnya kerjasama antar negara, karena setiap negara membutuhkan negara lain dalam mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Bahkan negara-negara maju sekalipun memiliki ketergantungan dengan negara lain. Setiap negara selalu berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya dibidang perekonomian khususnya kebutuhan konsumtif dasar seperti pangan dan minyak, serta gas. Rumusan kebijakan politik luar negeri setiap negara akan mengupayakan bahwa negaranya mendapatkan keuntungan dan prioritas dalam kerjasama internasional yang disepakati.

5. Kondisi dan Situasi Masyarakat Global/ Internasional

Masalah-masalah yang terjadi didalam tatanan masyarakat internasional khususnya yang berkaitan dengan perselisihan / konflik dalam internal suatu negara atau antar negara menjadi faktor dalam mengkonstruksi strategi dan arah kebijakan politik suatu negara. Seperti contoh Perang Rusia dan Ukraina membuat sebagian besar negara-negara eropa dan asia meberikan sanksi kepada rusia dan mengevaluasi hubungan politik luar negeri dengan rusia. Sementara ada terdapat beberapa negara yang berusaha terlihat netral namun sebetulnya berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dari kebuntuan politik akibat perang tersebut. Contohnya Negara Tiongkok yang merupakan sekutu dekat Rusia memilih untuk abstain dalam rancangan resolusi terhadap perang Rusia-Ukraina di PBB, meski dekat dengan Rusia, namun Tiongkok juga tidak menginginkan kehilangan keuntungan yang selama ini didapat dari kerjasama dengan negara-negara eropa.

Pandangan dan Kebijakan politik luar negeri pada hakikatnya didalam dimensi yang lebih fungsional adalah dimana kebijakan politik suatu negara dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap negara lain dan pada akhirnya menempatkan negara tersebut sebagai pihak yang dihormati, dihargai, dan disegani naik sebagai kawan maupun lawan, serta dianggap mampu untuk membantu didalam menyelesaikan konflik internasional atau konflik antar negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia

sendiri? Sebagai salah satu negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar didunia, tentu patut untuk dikaji bagaimana konstruksi pandangan dan kebijakan politik luar negeri yang selama ini dikenal dengan politik bebas aktif. Sejauh mana kebijakan politik memenuhi tujuan dan kepentingan nasional, serta pengaruh kebijakan politik Indonesia dipanggung internasional dalam sumbangsih menyelesaikan konflik internasional atau antar negara.

Metode

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penulisan kualitatif yang bersifat deskriptif-argumentatif dengan mencoba memaparkan suatu kondisi empiris yang menjadi objek penelitian dan kemudian, dianalisis, dikembangkan serta dikritisi dengan argumen ilmiah sesuai dengan fakta empiris yang relevan.

Diskusi & Pembahasan

A. Definisi, Landasan, dan Tujuan Kebijakan Politik Bebas Aktif Republik Indonesia

Pandangan dan kebijakan politik luar negeri memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan bernegara khususnya untuk kepentingan nasional. Indonesia dimasa pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945 telah menyadari bahwa eksistensi dan kedaulatan negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan hubungan internasional antar bangsa. Selain menggunakan jalur perang yang konfrontatif secara fisik, strategi diplomasi dengan berbagai negara-negara didunia yang bertujuan mendapatkan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu alat yang efektif didalam menekan Belanda yang memulai agresi militer untuk merebut wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia pada masa kemerdekaan dapat disimpulkan dari berbagai negara-negara di dunia khususnya dari Liga Arab yang memberikan pengakuan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Negara Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai negara berdaulat yang secara de facto pada

tangga 22 Maret 1946, dan kemudian setahun berselang tepatnya pada tanggal 10 Juni 1947 secara de jure membuka kedutaan besar pertama di Indonesia. Beberapa negara timur tengah juga memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia seperti Arab Saudi, Suriah, Libanon, Yaman, dan hingga Vatikan. Hal yang menarik lainnya adalah Pemimpin otoritas wilayah Palestina jauh sebelum proklamasi dikumandangkan tepatnya pada tahun 1944 oleh Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Alhusaini menyatakan di radio Berlin ucapan selamat kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan dari jajahan kolonialisme.⁶ Semua usaha untuk mendapat pengakuan internasional itu tidak dapat dilepaskan dari kepiawaian diplomasi dari para pemimpin bangsa dalam meyakinkan dunia internasional dengan berbagai pandangan-pandangan retorika politik yang membangkitkan rasa solidaritas antar bangsa.

Selepas Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh dan dukungan internasional secara luas, pandangan dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang belum terkonstruksi jelas menjadi sasaran gejolak tarik menarik kepentingan. Pada masa itu setelah berakhirnya perang dunia ke II, perseteruan antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet belum benar-benar berakhir, kedua negara tersebut melancarkan pengaruh kepada negara-negara di dunia untuk memihak antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipelopori oleh Uni Soviet. Konstelasi politik blok barat dan blok timur yang kemudian kita kenal dengan istilah perang dingin juga menyeret Indonesia yang baru eksis sebagai sebuah negara dalam pilihan yang sulit. Gerakan Komunisme di Indonesia pada masa itu dibawah Front Demokrasi Rakyat (FDR) mencoba untuk menggiring pemerintah masuk ke dalam blok timur Uni Soviet, namun hal tersebut mendapat pertentangan dan ketidaksetujuan dari Moh. Hatta sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang BP KNIP di Yogyakarta PM Mohammad Hatta menyampaikan pidato yang sangat fenomenal yang kemudian hari disepakati sebagai pandangan politik luar negeri Indonesia. Pidato

⁶ Daftar 6 Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 2021. <https://kompas.com>.

Mohammad Hatta yang diberi judul “Mendayung diantara dua karang” merupakan jawaban tegas dari Mohammad Hatta kepada FDR yang gigih menjadikan Indonesia dibawah pengaruh Uni Soviet. “*Tetapi masihkan kita sebagai bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, harus dihadapkan pada pilihan untuk memilih Rusia atau pro kepada Amerika Serikat? Apakah tidak ada pendirian lain yang dapat kita ambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pendirian yang seharusnya kita ambil adalah suapaya kita tidak menjadi objek didalam sebuah pertarungan politik internasional, akan tetapi kita sudah semestinya menjadi subjek yang berhak untuk menentukan sikap sendiri, yakni Indonesia yang merdeka seutuhnya.*⁷ Demikianlah sepenggal pidato dari Muhammad Hatta dalam menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang bebas menentukan arah kebijakannya sendiri, dan tidak harus ikut-ikutan didalam suatu gejolak politik internasional yang berpotensi membawa kerugian bagi Indonesia sebagaimana peribahasa “*Gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati ditengah-tengah*”. Konsep pandangan dari Mohammad Hatta pada akhirnya disepakati bahwa posisi Indonesia di dalam tatanan dunia internasional yang tidak memihak kemudian dikenal dengan politik bebas aktif.

Konsep politik bebas aktif yang digaungkan pada tahun 1948 ini telah menjadi sebuah tonggak bagi pandangan politik luar negeri Indonesia dalam merumuskan garis-garis kebijakan politik luar negeri hingga saat sekarang ini. Secara definisi politik bebas aktif sebagaimana pendapat dari M.C Riclefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern dapat dipahami sebagai sikap negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang memiliki jalan dan pendirian sendiri didalam memandang dan menyikapi permasalahan internasional tanpa harus memihak pada blok barat maupun blok timur, serta turut berperan aktif menciptakan perdamaian didunia.⁸ Mochtar Kusumaatmaja memberikan pengertian politik bebas aktif dalam dua variabel yang terpisah:

⁷ Litbang Kompas. (2019). Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta: Pencetus Politik Bebas-Aktif. Jakarta: Kompas. Hal 2-3

⁸ Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia. 2 November 2020. <https://kompas.com>.

- Bebas : bahwa Indonesia tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam butir-butir Pancasila.
- Aktif : bahwa di dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas persoalan masalah internasional, melainkan bersifat aktif dan reaktif dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan aksi lainnya yang menyokong perdamaian dunia

Dalam perjalannya banyak pihak yang menginterpretasikan definisi dari politik bebas aktif sebagai suatu kebijakan politik luar negeri yang bersifat netral tidak memihak negara manapun saat terjadi konflik, hal ini membuat timbulnya ambiguitas didalam masyarakat itu sendiri terkait dengan pemahaman politik bebas aktif yang kemudian dipandang sebagai sikap politik yang abu-abu dan tidak tegas. Pemahaman tentang politik bebas aktif yang terkurung dalam gejolak blok barat dan blok timur pada dasarnya merupakan pemahaman yang sempit karena kompleksitas masalah dunia internasional telah jauh berkembang lebih daripada persaingan blok barat dan blok timur. Pemahaman resmi tentang politik luar negeri bebas aktif dapat kita temukan didalam penjelasan Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri:

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 1 Nomor 37 Tahun 1999

"Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan Nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945".

Penjelasan dari definisi politik bebas aktif didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 memberikan gambaran bahwa garis kebijakan politik luar negeri Indonesia memegang nilai-nilai independensi yang tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan internasional atau bangsa lain

didalam membuat atau tidak membuat kebijakan, konsistensi didalam melaksanakan pandangan dan kebijakan politik luar negeri, serta memberikan reaksi terukur yang senafas dengan nilai-nilai didalam konstitusi.

Rumusan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Republik Indonesia memiliki landasan didalam pelaksanaannya, diantaranya⁹:

- Landasan Idiil

Landasan dalam membuat kebijakan politik luar negeri dan pelaksanaannya dilandaskan sesuai dengan falsafah dasar bernegara, yakni Pancasila. Kelima butir dalam sila Pancasila menjadi kerangka pedoman yang wajib ditaati didalam penyusunan dan pelaksanaan politik luar negeri.

- Landasan Konstitusional

Selanjutnya dalam hierarkis yang lebih rendah setelah Pancasila sebagai landasan Idiil, garis-garis kebijakan politik luar negeri Indonesia harus sejalan dengan amanat didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya didalam pembukaan dan termasuk juga batang tubuh. Sejak proklamasi dikumandangkan dan disusun UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Indonesia dengan tegas telah menyatakan kebijakan politik luar negerinya yang merupakan hasil kegetiran dan kepahitan semasa penjajahan, yang tercantum didalam Alinea Pertama “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan, dan prikeadilan*”. Dan pada Alenia Ke empat sebagai suatu sikap aktif dalam pergaulan internasional “*dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”.

⁹ Mila, Nasihatul., Dkk. 2020. Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume I Nomor 2, November 2020. Halaman 73-100. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>. Hal 80-81

- Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai instrument negara didalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakannya, seperti Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan *Luar Negeri*, Undang-Undang 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dan beberapa undang-undang lainnya yang turut mengatur kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Hal penting lainnya yang harus kita pahami terkait dengan politik bebas aktif ini adalah tujuan yang hendak dicapai. Secara universal dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya hubungan internasional antar bangsa tidak adalah untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara yang termasuk didalamnya kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan keamanan, dan kepentingan lainnya yang sesuai dengan rumusan kebijakan masing-masing negara. Indonesia sendiri sejak era pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi telah Menyusun berbagai tujuan yang hendak dicapai dan dipertahankan dari keaktifan dipanggung internasional. Pada era rezim Soekarno pernah dikeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945. Subtansi pokok dari maklumat tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan tujuan hubungan luar negeri diantaranya:

- Membangun sistem politi yang damai dan menjaga stabilitas sehingga tercipta kehidupan antar bangsa yang damai;
- Membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan negara tetangga dalam berbagai aspek dan bidang;
- Menghindari campur tangan terhadapp urusan dalam negeri negara lain;
- Menjalin Kerjasama antar negara yang sejalan dengan piagam PBB.

Tujuan dari hubungan politik luar negeri Indonesia juga pernah dipaparkan oleh Mohammad Hatta didalam pidato 2 September 1948 yang dikenal dengan judul pidato “Mendayung diantara dua karang”. Adapun pendapat dari Mohammad Hatta diantaranya:

➤ Mempertahankan kemerdekaan dan juga keamanan serta keselamatan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat;

- Mendapatkan kemudahan didalam memperoleh kebutuhan barang/jasa untuk bangsa dan masyarakat yang tidak diproduksi didalam negeri
 - Meningkatkan solidaritas dan rasa persaudaraan antar negara
 - Turut serta menjaga perdamaian dunia
 - Didalam Pembukaan UUD 1945 juga tersirat pokok-pokok tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yang diantaranya:
 - Mengupayakan perdamaian abadi antar bangsa
 - Menghapus segala jenis dan bentuk penjajahan, serta penindasan di dunia
 - Ikut menjaga ketertiban dunia dengan sumbangsih dan keaktifan dalam memberikan solusi dan bantuan bagi permasalahan internasional
 - Menjaga keharmonisan dan hubungan Kerjasama dengan negara lain yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional tanpa mengabaikan ketentuan hukum internasional
- Berdasarkan apa yang menjadi tujuan dari politik bebas aktif Indonesia tampak jelas bahwa politik bebas aktif Indonesia tidaklah menjadi suatu kebijakan yang bersifat pasif dan abu abu. Prinsip utama sebagaimana yang telah dijelaskan adalah pandangan politik dan kebijakan negara Indonesia bersifat mandiri dan tidak terikat atau dibawah tekanan suatu kekuatan lain yang mensubordinasi kedaulatan dan intergritas bangsa Indonesia.

B. Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada era sebelum reformasi memiliki rentetan historis yang sangat panjang untuk dibahas. Dalam masa sebelum reformasi dapat kita bagi garis kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam dua arus utama, yaitu kebijakan pada masa orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, serta rezim kabinetnya, dan kebijakan pada masa orde baru dibawah kuasa rezim Presiden Soeharto. Jika menelisik dan mengkaji arah kebijakan masing-masing rezim, maka akan ditemukan

banyaknya perbedaan yang substansial didalam rumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. Namun satu yang baku adalah bahwa pandangan politik dan kebijakan politik yang diusung masih menggunakan terminologi politik bebas aktif.

a. Kebijakan Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

Pada Masa Presiden Soekarno pada masa-masa awal kemerdekaan politik bebas aktif Indonesia dicerminkan dari sikap Indonesia yang tidak memihak atau menjadi bagian didalam Blok Barat atau pun Blok Timur. Akan tetapi dalam perjalannya sistem kebijakan politik orde lama mulai bergeser agak ke kiri lebih dekat dengan faham komunisme dan menjaga jarak dengan negara-negara barat yang berfaham imperialisme. Selain itu pula tipikal dari kebijakan Presiden Soekarno dalam politik luar negeri lebih bersifat konfrontatif, jika diplomasi yang dilakukan tidak membawa hasil sebagaimana yang diinginkan. Sikap frontal anti imperialisme Presiden Soekarno dapat dapat dilihat dari sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963, dimana slogan “Ganyang Malaysia” selalu bergema pada periode itu dalam setiap pidato Soekarno yang berapi-api. Sikap keras Soekarno ini lahir dari penolakan pembentukan negara federasi Malaysia yang berasal dari gabungan wilayah persemakmuran Inggris diantaranya Sabah, Serawak, Brunei dan singapura dengan semenanjung Malaysia. Tindakan pembentukan Federasi Malaysia atau persekutuan tanah Malaya ini dianggap Soekarno sebagai strategi dari Inggris untuk pemperkuat cengkraman imperialisme dan kolonialisme di Kawasan Asia Tenggara, yang pada akhirnya dikhawatirkan Soekarno akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Meski secara formal pandangan politik bebas aktif mengariskan ketidakberpihakan pada blok barat dan blok timur, namun kebijakan-kebijakan Soekarno sangat terasa keberpihakannya kepada blok timur salah satunya dengan pembentukan poros Jakarta-Peking-Phnompenh-Hanoi-Pyongyang dan Moskow yang diharapkan menjadi sekutu tandingan blok imperialisme dan kolonialisme.

Namun pada masa Soekarno ini juga menunjukkan keberhasilan Indonesia didalam menjalankan politik luar negerinya, yang dibuktikan dengan keberhasilan menggalang dukungan dari berbagai negara dalam pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dikemudian hari

menjadi cikal bakal dari pembentukan Gerakan Non Blok (GNB) yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya.

Kebijakan politik luar negeri masa orde baru memang menjadi bias dengan fakta sejarah disatu sisi kedekatannya dengan blok timur dan kebijakan membentuk poros tandingan, namun disisi lain tetap menyuarakan ketidak berpihakan terhadap perseteruan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam organisasi Gerakan Non Blok. Akan tetapi jika kita mengkaji lebih dalam berdasarkan perspektif kepentingan nasional, tentu kita dapat memahami model perpolitikan luar neger yang diusung Soekarno, dimana pada masa itu blok timur termasuk RRC dan Uni Soviet yang dengan tangan terbuka memberikan bantuan-bantuan kepada Indonesia “tanpa syarat”, berbeda dengan Blok Barat yang memberikan bantuan dengan berbagai syarat dan intrik politik yang berpotensi merugikan Indonesia. Bahkan Soekarno saat berpidato di kongres AS dengan tegas mengatakan Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dengan ikatan yang merugikan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Soekarno bahkan mengumpamakan bantuan Amerika Serikat seperti menjadikan Indonesia seperti burung kenari didalam sangkar emas.

b. Kebijakan Era Orde Baru

Kejatuhan rezim orde lama dan turunnya Soekarno dari kekuasaan sebagai presiden akibat peristiwa G30/S telah membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pergantian rezim orde baru membalikkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang semula dekat dengan Tiongkok dan Uni Soviet, menjadi lebih aktif berkerjasama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan hubungan Indonesia dengan RRC ataupun Uni Soviet menjadi semakin tegang dan rumit dikarenakan adanya indikasi keterlibatan negara-negara komunis tersebut didalam peristiwa G30/S.

Kekuasaan orde baru yang langgeng selama 32 Tahun dibawah kekuasaan Presiden Soeharto pandangan politik luar negeri Indonesia masih tidak berubah dengan prinsip Politik Bebas Aktif, namun berbeda dengan Soekarno dengan sikap konfrontatifnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil rezim orde baru lebih mengutamakan model *Soft*

*Power Diplomacy*¹⁰. Dimasa orde baru ini pula banyak keberhasilan yang dicapai didalam hubungan Kerjasama politik luar negeri yang berdampak langsung dengan kepentingan nasional, meskipun bayang-bayang persoalan HAM menjadi isu internasional yang menjadi kerikil dalam penampilan Indonesia di panggung Internasional. Garis kebijakan luar negeri yang diambil semasa orde baru pada awal pemerintahannya adalah fokus memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diwariskan dari rezim orde lama. Sebagaimana diungkapkan Adam Malik yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (1966-1978) dengan konsep yang diusungnya, yaitu sesegera mungkin mengembalikan citra dan wibawa pemerintah Indonesia dimata dunia internasional yang telah mengalami kerusakan dan penyimpangan akibat kesalahan kebijakan politik luar negeri pada masa lalu, dengan bertolak dari tujuan politik luar negeri Indonesia yang bermuara pada kepentingan nasional, serta menjauhkan diri dari kebijakan-kebijakan politik mercusuar yang akan merugikan bangsa dan negara.¹¹

Adapun berbagai capaian kebijakan politik luar negeri Indonesia semasa pemerintahan orde baru diantaranya:

1. Memprakarsai lahirnya Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 yang masa itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik.
2. Normalisasi hubungan dengan Negara Malaysia pada tahun 1966
3. Kembali bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966

¹⁰ Konsep Soft Power Diplomacy didalam pandangan Joseph S. Nye adalah suatu bentuk strategi dan keahlian untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks hubungan dengan negara lain, tanpa melalui suatu tindakan pemaksaan ataupun suatu diberikan janji-janji dalam bentuk imbalan yang tidak sejalan dengan etika internasional (Windiani, Reni. 2013. Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, Volume. 1 Nomor 2, Mei 2013. Halaman 94-95, 2013. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.88-98>)

¹¹ Arista, Fiky Dkk. 2017. Perbandingan Kebijakan Adam malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan Ali Alatas terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru. Jurnal Factum. Volume 6 Nomor, 1 April 2017. Halaman 76. DOI: <https://doi.org/10.17509/factum.v6i1.10019>

4. Pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia berdasarkan konsep deklarasi Juanda yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma Atmadja dalam Konvensi Hukum Laut di Montego Bay.¹²
5. Aktif didalam organisasi-organisasi dibawah kendali PBB dan ikut berperan serta menyelesaikan konflik internasional dengan mendorong ketegasan dari PBB dan Negara-Negara anggota.

Kebijakan politik luar negeri jaman orde baru pada dasarnya menunjukan model hubungan yang menginginkan kestabilan dan kedamaian dengan negara-negara lain dengan jalan persuasif dalam penyelesaian masalah lingkup internasional. namun kritik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi isu di dunia internasional terkait kedekatan Indonesia dengan negara barat dan sekutunya. Hal ini kemudian menjadi ganjalan bagi Indonesia untuk menjadi ketua Gerakan Non Blok, sebagaimana tercatat didalam sejarah bahwa sejak berdirinya Gerakan Non Blok meskipun Indonesia sebagai salah satu pemrakasa namun belum pernah menduduki jabatan kepemimpinan di organisasi tersebut. Pada tahun 1987 keinginan Indonesia untuk dapat dipilih menjadi pimpinan Gerakan Non Blok harus tertahan karena banyaknya penolakan dari anggota GNB dengan alasan:

1. Indonesia dalam kebijakannya politik luar negerinya terlalu pro kepada Barat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya
2. Indikasi pelanggaran HAM di Timor-Timur
3. Pembukaan Kedutaan Besar Palestina/ Organisasi Pembebasan Palestina /PLO di Jakarta.¹³

Untuk meredam isu-isu tersebut beberapa kebijakan politik diambil oleh Soeharto untuk menampilkan citra Indonesia yang membantah keberpihakan kepada barat, beberapa diantaranya:

1. Memperbaiki dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China.
2. Melakukan kunjungan ke Uni Soviet dan membangun Kerjasama ekonomi dengan Uni Soviet.

¹² ibid

¹³ Mandala, Eka. 2016. Indonesia Merintis Menjadi Ketua Gerakan Nonblok. <https://www.pinhome.id/blog/indonesia-merintis-menjadi-ketua/>

3. Membantu menyelesaikan persoalan konflik perang saudara di Kamboja dengan mengagas forum yang diberi nama *Jakarta International Meeting*, hingga menjadi ketua dalam pakta perdamaian yang dilaksanakan dan disetujui di Paris sebagai langkah mengakhiri konflik.¹⁴

c. Kebijakan Pasca Reformasi

Rezim orde baru yang telah berkuasa 32 tahun pada akhirnya runtuh juga dengan tuntutan reformasi sebagai jawaban dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa orde baru. Pasca bergulirnya reformasi, prinsip dan padangan politik bebas aktif masih menjadi pedoman dalam mengariskan kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi mengalami pasang surut dari satu era kepemimpinan ke pemimpinan lain.

1) *Pemerintahan Abdurahman Wahid*

Pada Masa era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) wajah perpolitikan luar negeri Indonesia memiliki kekhasannya sendiri, karena keberanian Gus Dur didalam mendobrak beberapa pakem kebijakan yang tidak pernah disentuh oleh pemimpin di era sebelumnya. Hubungan luar negeri menjadi salah satu prioritas dalam kabinet persatuan nasional, dimana dalam dua tahun kepemimpinan Gus Dur telah mencatatkan kunjungan kenegaraan Gus Dur ke lebih dari 50 Negara di lima benua yang bertujuan meningkatkan hubungan Kerjasama di segala aspek dan bidang khususnya di bidang ekonomi.¹⁵ Salah satu kebijakan luar negeri Gus Dur yang memantik banyak pertentangan didalam negeri adalah kebijakan untuk menjalin hubungan diplomatik dan memperkuat hubungan Kerjasama dengan Negara Israel yang mana sejak jaman orde baru telah ditetapkan untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel akibat konflik dengan Palestina. Meski pada akhirnya kebijakan tersebut tidak terealisasi hingga Gus Dur Lengser ke Prabon. Dimasa kepemimpinan Gus Dur ini pula ada capaian positif yang

¹⁴ ibid

¹⁵ Widhiyoga, Ganjar, & Setyasiyah Harini. (2019). Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). Research Fair Unisri Volume 3 No 1 Januari 2019 Halaman 568-569. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2618>

berhubungan dengan pemetaan dan penyusunan kebijakan politik luar negeri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Keputusan Presiden terkait Tata Koordinasi Penyelenggaraan Hubungan luar Negeri¹⁶.

2) Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Berlanjut kepada kepemimpinan era Presiden Megawati, kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti, fokus pemerintahan Megawati sejak mengambil alih kepemimpinan dari Gus Dur lebih condong kepada perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional. Sebagian kebijakan politik luar negeri yang diambil terkesan melanjutkan warisan garis kebijakan yang telah dijalankan pada kepemimpinan sebelumnya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Diawal-awal masa pemerintahan Megawati terjadi peristiwa internasional yang sangat membawa dampak baik langsung ataupun tidak langsung kepada Indonesia, yakni serangan 11 September 2001 oleh Teroris Al qaidah yang membajak dan menabrakan pesawat ke Gedung pencakar langit Amerika Serikat. Pasca serangan tersebut perang terhadap teroris digaungkan oleh Amerika Serikat dipanggung internasional dengan pembentukan aliansi pemberantasan terorisme dengan negara-negara lain. Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut mendukung pembentukan koalisi tersebut. Keikutsertaan Indonesia bukan tanpa sebab, pertimbangan utama adalah Indonesia juga masih bergulat menghadapi persoalan terorisme dan Amerika Serikat dengan segala sumberdayanya merupakan partner yang strategis untuk membantu Indonesia memberantas terorisme.

Semasa pemerintahan Megawati dari tahun 2001 hingga 2004 konstelasi politik luar negeri Indonesia memang tidak banyak gebrakan yang kontroversial yang mampu menarik perhatian dunia internasional.

¹⁶ Mila, Nasihatul., Dkk. 2020. Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume I Nomor 2, November 2020. Halaman 86. <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>

kondisi krisis yang melanda Indonesia kala itu menjadikan perhatian Megawati lebih fokus membuat kebijakan nasional yang dapat diterima dunia internasional dalam rangka membantu pembangunan nasional. Memang pada masa-masa tersebut Megawati menghadapi kesulitan yang luar biasa sehingga tidak banyak pilihan yang dapat diambil, namun berkat kestabilan kebijakan politik luar negeri yang dijalankan, dunia internasional menaruh kepercayaan kepada Indonesia dengan banyaknya bantuan luar negeri yang diterima dalam rangka pemulihan krisis ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

3) Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono

Dibandingkan dengan dua pendahulunya pemimpin di era pasca reformasi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki waktu yang lebih panjang dengan masa jabatan 2 periode dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Dengan masa jabatan yang relatif panjang dan kondisi perekonomian yang mulai keluar dari krisis, kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu juga semakin menunjukkan citra populis dan mulai menarik perhatian dunia internasional. arah tatanan dunia internasional dalam dekade tahun 2000an telah mengalami banyak perubahan. Dunia tidak lagi dipisahkan dua kekuatan besar blok barat dan blok timur.

Keruntuhan Uni Soviet tahun 1991 menjadikan hilangnya persaingan antara blok barat dan timur, namun sejalan dengan itu, dunia dihadapi pada tantangan persaingan global antar negara yang semakin bebas dan beberapa negara salah satunya Tiongkok tampil menjadi negara yang siap bersaing dengan Amerika Serikat. Indonesia dibawah pemerintahan SBY pada awal pemerintahan nampak lebih memfokuskan pencitraan diri dalam wilayah regional ASEAN dengan sikap peran aktif mengunjungi Malaysia dan Singapura sebagai negara pertama yang dikunjungi sejak dilantik menjadi presiden. Langkah yang diambil oleh SBY ini adalah upaya strategi menampilkan *branding diri* yang lebih *high profile* di kancah dunia internasional dengan menggunakan ASEAN sebagai batu lompatan. Citra yang ingin dibangun oleh SBY dipanggung luar negeri sebagaimana yang diungkapkan SBY saat kunjungan ke Selandia Baru pada tahun 2009 dengan slogan " *Having Million Friends and Zero*

*Enemies*¹⁷ adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk berteman dengan negara-negara manapun di dunia untuk membangun Kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas kepercayaan dan persamaan. Menurut Rizal Sukma peneliti dari Centre for Strategic and Internasional Institute (CSIS) dan juga Duta Besar RI Berkuasa Penuh untuk Inggris periode 2016-2020, kebijakan luar negeri SBY terfokus dalam 3 hal, yakni:

1. Prioritas pembentukan komunitas dalam wilayah regional dengan prinsip multilateralsime.
2. Fokus pada hubungan Kerjasama politik dan ekonomi dengan negara-negara maju secara global dan regional seperti Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, Australia.
3. Bersikap pro aktif terhadap isu-isu internasional yang berdampak bagi keberlangsungan ekosistem dunia, seperti perubahan iklim, keamanan energi, keamanan pangan, dan perekonomian global.¹⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap pro aktif Indonesia dipanggung internasional dengan keterbukaan dan *Soft Power Diplomacy* dengan slogan *Thousands Friends, Zero Enemies* yang ditunjukkan secara konsisten sepanjang pemerintahan SBY telah meningkatkan kepercayaan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, serta menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara besar yang dapat diandalkan kontribusinya. Beberapa capaian dari kebijakan luar negeri pemerintahan SBY diantaranya: Perjanjian *Free Market /Pasar bebas Bersama dengan negara kunci kawasan asia* seperti Jepang, Tiongkok, dan India, dan menjadi pemimpin didalam forum-forum internasional salah satunya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik /*Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).

¹⁷ Rizky, Alif, dkk.2018. Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan “Middle Power” Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional* Volume 6 Nomor 2, Maret 2018. Halaman 152

¹⁸ Widiyatmadja, Aji, & Ulul Albab.2019. Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan. *Jurnal Politica* Volume 10 Nomor 1 Mei 2019. Halaman 85. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>

4) Pemerintahan Joko Widodo

Peralihan kekuasaan dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi) dalam perspektif kebijakan-kebijakan luar negeri dapat dikatakan tidak memiliki perubahan yang berarti, garis kebijakan pemerintahan Jokowi selayaknya dapat dikatakan sebagai kontinyuitas dari kebijakan pemerintahan SBY sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pandangan politik internasional Jokowi yang dinilai lebih *Low Profile* dibandingkan dengan kepemimpinan SBY yang menampilkan citra pemimpin internasional yang *High Profile*. Sikap Jokowi didalam politik luar negeri yang kurang menunjukkan ketarikan yang tinggi terhadap isu-isu internasional tidak dapat dilepaskan dari karakter kepemimpinan Jokowi yang nampak lebih memfokuskan diri dalam pembangunan nasional dan semua yang terkait dengan kerjasama internasional harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. Jokowi yang sering absen didalam forum tertinggi dunia yakni sidang PBB menunjukan bahwa panggung politik global yang multilateral bukan zona yang nyaman buat Jokowi. Meskipun sebagian kalangan mengoreksi sikap pragmatisme Jokowi, namun dari segi kebijakan-kebijakan internasional Indonesia yang telah memiliki pondasi dan citra yang baik di mata dunia internasional tetap mampu berbicara dan menunjukan pengaruhnya, seperti terpilihnya Indonesia dua periode berturut-turut sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2021, Presidensi G-20, kepemimpinan di berbagai forum-forum dunia, serta dukungan dalam mendorong penyelesaian konflik internasional seperti Israel -Palestina, konflik Myanmar, konflik Rusia-Ukraina dan lain sebagainya. Kebijakan politik luar negeri yang bertolak pada kepentingan nasional pada periode pertama pemerintahan Jokowi sebagaimana tercatat didalam makalah kerja CSIS dengan judul Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018) menjelaskan sebagai berikut:

1. Terciptanya keamanan dan perdamaian
2. Diplomasi dalam peningkatan hubungan kerjasama dibidang ekonomi
3. Perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum di luar negeri
4. Peningkatan Kerjasama dalam wilayah ASEAN

5. Pelaksanaan diplomasi maritim.

Pola komunikasi politik luar negeri yang dibangun oleh Jokowi sebagaimana diuraikan diatas memang memiliki fokus pada sisi ekonomi bisnis terkait untung rugi, namun dalam perspektif kebijakan lain Jokowi juga berusaha mengangkat citra Indonesia dari Negara *Emerging Market* menjadi Negara *Middle Power* dengan langkah-langkah yang bersifat asertif tanpa ragu untuk menunjukkan simbol-simbol yang sedikit konfrontatif ketika bersinggungan dengan kedaulatan dan dalam upaya mengamankan teritori negara.¹⁹ Seperti kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing, ataupun dengan tegas mengklaim landasan kontinen ZEE sejauh 200 mil laut natuna utara yang memicu kritik keras dari Tiongkok, serta kedatangan Jokowi ke Natuna setelah adanya pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan china dan kapal *Coast Guard China*.

Sikap kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi pada kenyataannya masih memegang sikap *Soft Diplomacy* namun untuk hal-hal yang tidak menyangkut dengan kepentingan Indonesia secara langsung. Konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia berada dalam posisi yang tidak nyaman karena dampak dari perang tersebut membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia khususnya yang masih tergantung dengan impor minyak dunia. Apalagi dengan kedudukan Indonesia sebagai Presidensi G-20 pada tahun 2022 ini yang diuji untuk dapat memaksimalkan peran sebagai pemimpin G-20 dengan ancaman boikot dari Amerika Serikat dan sekutunya Uni Eropa atas rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam puncak G-20 Pada November 2022 di Bali.

Kesimpulan

Prinsip politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia di dunia internasional pada hakikatnya masih sangat relevan untuk diterapkan oleh Negara Indonesia. Prinsip ini tidak berubah sejak era orde baru saat dicetuskan dalam pidato Moh Hatta pada tahun 1948 hingga era

¹⁹ Rizky, Alif, dkk.2018. Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan “Middle Power” Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional Volume 6 Nomor 2, Maret 2018. Halaman 159

kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam panggung internasional prinsip politik bebas aktif telah diakui oleh dunia sebagai salah satu strategi perpolitikan yang dapat merangkul kawan maupun membuat segan lawan, meskipun dalam realitasnya interpretasi terhadap politik bebas aktif sangat tergantung dengan rezim yang berkuasa dan juga berdasarkan kepentingan nasional. sikap bebas aktif yang ditunjukkan bisa dalam model *Soft Power Diplomacy* ataupun dengan sifat konfrontatif dari hanya sekedar simbolisme seperti yang dipraktekkan Presiden Joko Widodo hingga tindakan reaktif aktif yang digunakan Presiden Soekarno. Pentingnya memiliki tempat dipanggung internasional dalam tingkatan yang lebih tinggi tidak hanya dapat dipandang sebagai upaya mengamankan kepentingan nasional semata, namun sumbangsih terhadap perdamaian dunia dalam membantu menyelesaikan konflik internasional akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara "*Middle Power*". Dan untuk mencapai ketahap tersebut prinsip politik bebas aktif harus dikembangkan lebih luas dan komprehensif yang mencakup semua aspek dan bidang dengan komitmen dan konsistensi, serta integritas sebagai bangsa yang besar.

Referensi

- Arista, Fiky Dkk. 2017. Perbandingan Kebijakan Adam malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan Ali Alatas terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Factum*. Volume 6 Nomor, 1 April 2017. Halaman 70-92.
<https://doi.org/10.17509/factum.v6i1.10019>
- Hatta, Mohammad, (1951). Mendajung Antara Dua Karang : Keterangan Pemerintah diutjapkan Oleh Drs. Mohammad Hatta di Muka Sidang BPNKP di Djokja pada Tahun 1948. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia
- Kusmayadi, Yadi. 2017. Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia- Malaysia Tahun 1963-1966. *Jurnal Artefak*. Volume 4 Nomor 1, April 2017. Halaman 23-34.
DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v4i1.732>
- Litbang Kompas. (2019). Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta: Pencetus Politik Bebas-Aktif. Jakarta: Kompas

- Mansbach, Richard W ., dan Kirsten L Rafferty. (2021). Kebijakan Luar Negeri dan Perang: Seri Pengantar Politik Global. Bandung: Nusa Media
- Mila, Nasihatul., Dkk. 2020. Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume I Nomor 2, November 2020. Halaman 73-100. <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2021). Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Soeharto Terkait Konflik Timur Tengah. Jakarta: Tempo Publising
- Rizky, Alif, dkk. 2018. Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan “*Middle Power*” Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional Volume 6 Nomor 2, Maret 2018. Halaman 151-168. <https://doi.org/10.18196/hl.62112>
- Rofii Adji Sayekti, Moh, (2018). Peranan Politik Luar negeri Bebas Aktif dalam Percaturan Global. Yogyakarta: Cempaka Putih
- Soenanda, Moenir Ari. Kebijakan Luar negeri dan Strategi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik, Makalah Diklat BIN disampaikan pada 25 Agustus 2006
- Triwahyuni, Siti Nuraili., Dkk. 2021. Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. Jurnal Indonesia Sosial Sains Volume 2 Nomor 12, Desember 2021. Halaman 2118-2125. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Vermonte, Philips Jusario. Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Rasionalisme, dalam Media Indonesia , 20 Desember 2002
- Widhiyoga, Ganjar, & Setyasiyah Harini. 2019. Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). Research Fair Unisri Volume 3 No 1 Januari 2019 Halaman 561-578. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2618>
- Widiatmadja, Aji, & Ulul Albab.2019. Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah

- Dinamika Lingkungan. Jurnal Politica Volume 10 Nomor 1 Mei 2019. Halaman 77-93. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>
- Windiani, Reni. 2013. Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Volume. 1 Nomor 2, Mei 2013. Halaman 88-98, 2013. <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.88-98>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak Ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak Ada.*